

PENGARUH INTEGRITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Try Sutrisno R^{*1}, Rustan DM², Abdul Khalik³

¹ Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

² Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³ Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

e-mail: trybisa86@gmail.com, rustandm@stienobel-indonesia.ac.id, khalik@stienobel-indonesia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh integritas, transparansi dan akuntabilitas secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga dan variabel yang berpengaruh dominan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga, penelitian ini dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan mengambil 54 orang pegawai sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel integritas, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pengelolaan belanja tidak terduga, secara simultan variabel integritas, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga dan variabel integritas memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga.

Kata kunci: Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, Belanja Tidak Terduga.

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of integrity, transparency and accountability partially and simultaneously on the management of unexpected expenditures and the variables that have a dominant influence on the management of unexpected expenditures. This research was conducted at the Regional Disaster Management Agency of West Sulawesi Province by recruiting 54 employees as research sample. The results showed that partially the variables of integrity, transparency and accountability had a significant positive effect on the management of unexpected expenditures, simultaneously the variables of integrity, transparency and accountability had a significant positive effect on the management of unexpected expenditures and the integrity variable had the most dominant influence on the management of unexpected expenditures.

Keywords: Integrity, Transparency, Accountability, Unexpected Spending.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tahap awal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilaksanakan pemerintah melalui otonomi daerah. Undang-Undang tersebut menciptakan sesuatu yang baru dalam pengaturan mengenai pemerintahan daerah diseluruh Indonesia yang lebih mengutamakan pembangunan di Indonesia. Terdapat suatu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yang namanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Terdapat salah satu poin di dalam belanja daerah yang namanya Belanja Tidak Terduga (BTT). Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan

untuk keperluan darurat, dimana keperluan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi menggunakan BTT untuk penanggulangan bencana alam, non alam maupun kegiatan yang terkait dengan pengeluaran tidak terduga lainnya. Dalam rangka penanganan bencana pemerintah menerapkan kebijakan terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk menangani dampak dari bencana di Indonesia. Dana BTT tersebut dapat dicairkan apabila daerah telah menetapkan status darurat terhadap bencana tersebut, untuk menetapkan status darurat bencana terhadap bencana di suatu daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kajian atau penilaian yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam PP 12 Tahun 2019 Pasal 69 ayat 2, diatur bahwa suatu kondisi atau keperluan mendesak meliputi: (a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (c) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Berdasarkan data dari DIBI BNPB dan BPBD wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks risiko 165.23 (tinggi).

Adapun nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Indeks Risiko Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

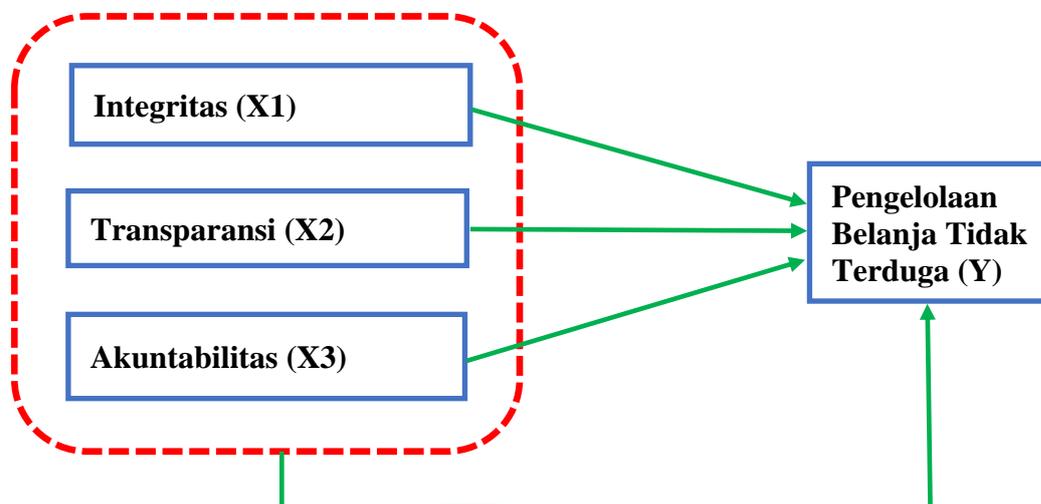
No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Kelas Resiko 2022
1	Majene	216,80	216,80	216,80	217,62	208.30	Tinggi
2	Pasangkayu	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	Tinggi
3	Mamuju Tengah	166,13	166,13	166,13	161,71	161,71	Tinggi
4	Mamuju	145,13	145,13	145,13	145,13	161,71	Tinggi
5	Mamasa	154,00	154,00	154,00	147,02	147,02	Tinggi
6	Polewali Mandar	140,81	140,81	140,81	140,81	135,81	Sedang

Dalam pengelolaan belanja tidak terduga dibutuhkan integritas Pegawai Negeri Sipil yang merupakan suatu aspek abdi masyarakat yang berguna untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan secara nasional. Seorang PNS mengabdikan dirinya ke Negara berada dalam lingkup yang lebih kecil dan spesifik lagi yaitu pada sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). PNS diminta untuk mempunyai kualitas integritas yang baik. Integritas pada PNS yaitu prinsip sikap dan perilaku PNS yang didasarkan pada aspek jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab

demikian membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

Selain integritas, transparansi dan akuntabilitas juga diperlukan dalam pengelolaan belanja tidak terduga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatur bahwa pengelolaan keuangan suatu daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan undang-undang yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dan memerhatikan asas keadilan serta kepatuhan. Keuangan daerah perlu memperhatikan asas efektif, efisien, transparan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam pengelolaan belanja tidak terduga, transparansi ini dimaksudkan agar aparat bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai amanat yang diberikan masyarakat dalam mengelola keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana yang penggunaannya untuk seluruh kepentingan masyarakat. Akan tetapi, masih banyak desa yang belum melaksanakan hal tersebut, sehingga desa dinilai belum bisa memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program kegiatan dan juga kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan. Pembuatan laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas pertanggungjawaban aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, terutama informasi keuangan harus dibuat dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Berdasar pada uraian di atas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:



HIPOTESIS PENELITIAN

Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat tiga hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
2. Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (Simultan) terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

3. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2011). Survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Penelitian ini dilaksanakan dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai April 2023 sampai dengan Mei 2023. Dengan sampel penelitian berjumlah 54 Pegawai. Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data penelitian, selanjutnya Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas kemudian uji hipotesis digunakan uji t untuk menguji hubungan seara parsial dan uji f untuk mengetahui hubungan secara simultan. Analisis kebermaknaan dalam penelitian ini digunakan melalui uji koefisien determinasi (R square).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji validitas

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0.05$ (Santoso, 2015). Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen tersebut valid jika nilai $r \geq 0,2387$ (R Tabel). Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel

No	Variabel	Butir Instrumen	r Hitung	r Tabel	Status
1	Integritas (X1)	Integritas 1	0,747	0,2681	Valid
		Integritas 2	0,802	0,2681	Valid
		Integritas 3	0,793	0,2681	Valid
		Integritas 4	0,815	0,2681	Valid
		Integritas 5	0,517	0,2681	Valid
2	Transparansi (X2)	Transparansi 1	0,504	0,2681	Valid
		Transparansi 2	0,732	0,2681	Valid
		Transparansi 3	0,659	0,2681	Valid
		Transparansi 4	0,570	0,2681	Valid
		Transparansi 5	0,729	0,2681	Valid
		Transparansi 6	0,732	0,2681	Valid
		Transparansi 7	0,659	0,2681	Valid
		Transparansi 8	0,570	0,2681	Valid
		Transparansi 9	0,729	0,2681	Valid
3	Akuntabilitas (X3)	Akuntabilitas 1	0,378	0,2681	Valid
		Akuntabilitas 2	0,738	0,2681	Valid
		Akuntabilitas 3	0,779	0,2681	Valid

		Akuntabilitas 4	0,701	0,2681	Valid
		Akuntabilitas 5	0,540	0,2681	Valid
		Akuntabilitas 6	0,738	0,2681	Valid
		Akuntabilitas 7	0,779	0,2681	Valid
		Akuntabilitas 8	0,701	0,2681	Valid
		Akuntabilitas 9	0,540	0,2681	Valid
4	Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Y)	BTT 1	0,497	0,2681	Valid
		BTT 2	0,507	0,2681	Valid
		BTT 3	0,829	0,2681	Valid
		BTT 4	0,842	0,2681	Valid
		BTT 5	0,831	0,2681	Valid
		BTT 6	0,829	0,2681	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2681, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya..

b. Uji Reliabilitas

Kehandalan instrumen dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik *alpha cronbach* dengan menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS. Nilai batas (*cut of point*) yang diterima untuk tingkat *alpha cronbach* adalah ≥ 0.60 , walaupun ini bukan merupakan standar absolut (Sekaran, 2011). Instrumen dianggap telah memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah ≥ 0.70 . Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut of Point	Status
Integritas (X_1)	0,768	0,70	Reliabel
Transparansi (X_2)	0,833	0,70	Reliabel
Akuntabilitas (X_3)	0,835	0,70	Reliabel
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Y)	0,783	0,70	Reliabel

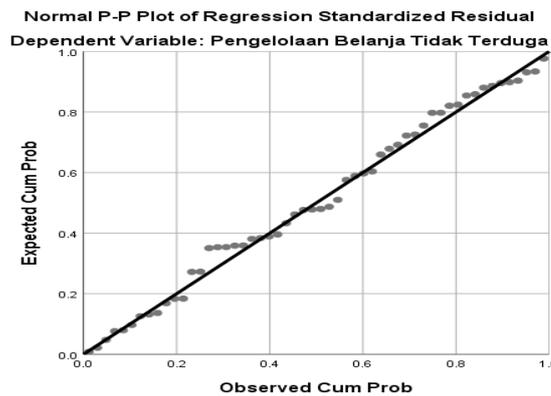
Dari pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah $\geq 0,70$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima.

2. Uji Asumsi Klasik

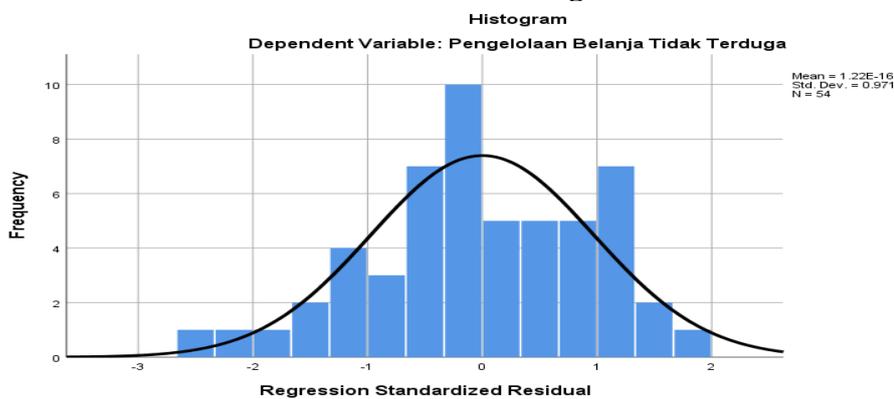
a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan *probability plot*, hal itu dapat dilihat dari gambar berikut.

Normal Probability Plot



Grafik Histogram



Dari grafik di atas dapat dilihat garis histogram mengikuti pola distribusi yang normal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas. Selain memperhatikan persebaran titik-titik pada probability plot dan grafik histogram, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov.

**Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.83299585
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.087
	Positive	.050
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Setelah dilakukan pengujian statistic Kolmmogrov-Smirnov sebagaimana dapat dilihat dari tabel diatas, maka didapat nilai signifikansi $0,200 > 0,05$, artinya dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.217	2.630		-.463	.646
	Integritas	.482	.148	.364	3.258	.002
	Transparansi	.195	.082	.269	2.388	.021
	Akuntabilitas	.216	.066	.337	3.293	.002

a. Dependent Variable: Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Dari tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,217 + 0,482X_1 + 0,195X_2 + 0,216X_3 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Tidak Terduga

X₁ = Integritas

X₂ = Trasnparansi

X₃ = Akuntabilitas

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Error Term

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -1,217. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu integritas, transparansi dan akuntabilitas dianggap tidak ada atau bernilai nol maka skor variabel pengelolaan belanja tidak terduga akan semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja tidak terduga sangatlah membutuhkan suatu integritas, transparansi dan akuntabilitas untuk dapat semakin meningkat, Koefisien regresi variabel integritas sebesar 0,482 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel integritas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan belanja tidak terduga. Semakin meningkatnya nilai integritas, maka akan semakin meningkat pula nilai dari pengelolaan belanja tidak terduga, Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,195 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan belanja tidak terduga. Semakin meningkatnya nilai transparansi, maka akan semakin meningkat pula nilai dari pengelolaan belanja tidak terduga dan Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,216 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan belanja tidak terduga. Semakin meningkatnya nilai akuntabilitas, maka akan semakin meningkat pula nilai dari pengelolaan belanja tidak terduga.

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t (Uji Parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah masing- masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependennya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai thitung \geq ttabel, maka variabel bebasnya secara individu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.217	2.630		-.463	.646
	Integritas	.482	.148	.364	3.258	.002
	Transparansi	.195	.082	.269	2.388	.021
	Akuntabilitas	.216	.066	.337	3.293	.002

a. Dependent Variable: Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan tabel diatas dapat menjelaskan bahwa:

1) Pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y)

Nilai t hitung variabel integritas sebesar 3,258 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,258 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel integritas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pengelolaan belanja tidak terduga.

2) Pengaruh variabel transparansi publik (X2) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y)

Nilai t hitung variabel transparansi sebesar 2,388 dan tingkat signifikansi sebesar 0,021. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,388 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0.021 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pengelolaan belanja tidak terduga.

3) Pengaruh variabel aktivitas pengendalian (X3) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y)

Nilai t hitung variabel transparansi sebesar 3,293 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,293 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pengelolaan belanja tidak terduga.

4) Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.18 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel integritas nilai sebesar 0,364, variabel transparansi sebesar 0,269 dan variabel akuntabilitas sebesar 0,337. Hal ini menunjukkan bahwa variabel integritas merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel pengelolaan belanja tidak terduga sebesar 36,4%.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Apabila nilai Fhitung \geq dari nilai Ftabel berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan probabilitas atau peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika probabilitas $< \alpha$ (0,05). Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 6 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	492.129	3	164.043	19.282	.000 ^b
	Residual	425.371	50	8.507		
	Total	917.500	53			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Integritas, Transparansi

Nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 19,282 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,79. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung $>$ F tabel ($19,282 > 2,79$) dan nilai signifikansi sebesar $0.00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel integritas, transparansi dan akuntabilitas secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pengelolaan belanja tidak terduga.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian dalam menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R square, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.732 ^a	.536	.509	2.917	1.219	

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Integritas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Nilai R Square sebesar 0,536 atau 53,6%, ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dijelaskan oleh integritas, transparansi dan akuntabilitas adalah sebesar 53,6 % sedangkan sisanya sebesar 0,464 atau 46,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis yang didapat berdasarkan penelitian dan pengelolaan data melalui SPSS 25 adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Integritas terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara integritas terhadap pengelolaan belanja tidak terduga, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel integritas maka akan semakin meningkatkan pula variabel pengelolaan belanja tidak terduga. Begitu pula sebaliknya, jika variabel integritas menurun, maka tingkat pengelolaan belanja tidak terduga juga ikut menurun. Pengelolaan belanja tidak terduga ini tentunya sangat membutuhkan integritas yang berkualitas agar Pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat, Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas terkait pengelolaan belanja tidak terduga dalam penanggulangan bencana, tentunya integritas para pegawai sangat dibutuhkan. Perilaku dengan sikap kejujuran dan memberi pelayanan sepenuh hati menjadi hal yang ditanamkan secara baik kepada semua pegawai. Pegawai negeri yang diberikan tugas pengelolaan belanja tidak terduga dalam penanggulangan bencana harus memberi keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan para pegawai sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika serta sesuai dengan aturan hukum dan tidak menzalimi kepentingan umum. Integritas yang ditunjukkan merujuk pada sifat layak dipercaya dalam diri seorang manusia yang di dalamnya terdapat kualitas-kualitas individu seperti karakter jujur, amanah, tanggungjawab, kedewasaan, sopan, kemauan bersikap baik dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Integritas pegawai dalam pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat sudah dinilai baik. Hasil ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang berfokus pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Susi Ardiani, 2019) bahwa bahwa integritas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,665 (lihat pada tabel statistik). Karena t hitung $>$ t tabel ($2,120 > 1,665$) dengan nilai signifikan sebesar 0,005 maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau (sig) $0,005 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Independen Integritas (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y).

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan belanja tidak terduga, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel transparansi maka akan semakin meningkatkan pula variabel pengelolaan belanja tidak terduga. Begitu pula sebaliknya, jika variabel transparansi

menurun, maka tingkat pengelolaan belanja tidak terduga juga ikut menurun, Hal ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini tentunya sangat membutuhkan transparansi yang baik agar mendapatkan hasil efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Hasil ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakannya pemerintah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, maka dari hal itu pemerintah mengupayakan melakukan usaha transparansi yang terbaik dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuningtyas Mutiara Putri, Rusbiyanti Sripeni dan Andri Hasmoro Kusumo Broto (2020) menyatakan bahwa Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi aktifitas Transparansi, maka akan semakin tinggi pula pengelolaan keuangan kelurahan yang dihasilkan. Didalam aktivitas Transparansi, seluruh komponen terlibat dalam proses ini baik pegawai kelurahan maupun masyarakat sehingga terjadi umpan balik yang baik sesuai tujuan.

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan belanja tidak terduga, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel akuntabilitas maka akan semakin meningkatkan pula variabel pengelolaan belanja tidak terduga. Begitu pula sebaliknya, jika variabel akuntabilitas menurun, maka tingkat pengelolaan belanja tidak terduga juga ikut menurun. Hasil ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakannya pemerintah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini tentunya sangat membutuhkan akuntabilitas yang matang agar mendapatkan hasil efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2019) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebagaimana ditemukan oleh Selin Aghnia Mardatilla (2022) yang menyatakan bahwa peran akuntabilitas di organisasi sektor pemerintahan sudah menerapkan dengan maksimal dan Regina Angie (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berperan dalam peningkatan kinerja keuangan dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi publik dan kepatuhan terhadap hukum menjadi poin utama dalam melakukan pekerjaan.

4. Pengaruh Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas Secara Bersama-Sama (Simultan) Terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel integritas, transparansi dan akuntabilitas secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pengelolaan belanja tidak terduga. Ketiga variabel ini akan sangat efektif bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan pengelolaan belanja tidak terduga pada tahun-tahun kedepannya. Dengan meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama maka bukan tidak mungkin pengelolaan belanja tidak terduga akan ikut meningkat.

5. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.18 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel integritas nilai sebesar 0,364, variabel transparansi sebesar 0,269 dan variabel akuntabilitas sebesar 0,337. Hal ini menunjukkan bahwa variabel integritas merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel pengelolaan belanja tidak terduga sebesar 36,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa integritas memiliki pengaruh yang sangat vital pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan pengelolaan belanja tidak terduga. integritas yang berkualitas ialah integritas yang telah memiliki pengendalian yang baik dan terarah. Tanpa suatu integritas yang berkualitas maka transparansi maupun akuntabilitas tidak akan terarah dan tertata dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis diperoleh integritas, transparansi dan akuntabilitas secara parsial dan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menunjukkan bahwa integritas, transparansi dan akuntabilitas meningkat maka pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat semakin baik. Berdasarkan hasil tersebut maka pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan baik. Terbukti dengan adanya hasil yang menunjukkan tingkat integritasi, transparansi, dan akuntabilitas yang sangat berperan penting dalam tingkat kinerja pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun integritas menjadi variabel yang paling dominan dibandingkan dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen integrasi yang baik dan terarah menjadi inti dari pengelolaan belanja tidak terduga yang transparansi dan akuntabilitas dalam satu periode.

SARAN

Adapun saran-saran penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah diimplementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
2. Untuk menemukan keakuratan data penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meluaskan objek penelitian, tidak hanya pada satu instansi dengan rentan waktu yang lebih panjang.
3. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel independent lainnya selain integritas, transparansi dan akuntabilitas yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependent pengelolaan belanja tidak terduga agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independent lain diluar penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi pengelolaan belanja tidak terduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ni Kadek Rai Eldayanti, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Ni Wayan Yuniasih (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2020.
- Republik Indonesia, Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Singarimbun, M & Effendi, S. (2011). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susi Ardiani (2019). Pengaruh Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin). Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol.3 No.2, Juli 2019.
- Wahyuningtyas Mutiara Putri, Rusbiyanti Sripeni dan Andri Hasmoro Kusumo Broto (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Jurnal Ilmu - Ilmu Akuntansi; ISSN: 2723-4843 Volume 1 Nomor 2 September 2020.